

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke dalam hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang hanya oleh penyertaan-Nya selalu menyertai saya sampai saat ini dan oleh hikmah-Nya saja yang telah memungkinkan saya untuk dapat menyelesaikan masa perkuliahaan dan disertasi dengan judul “EKSISTENSI NEPOTISME DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”. Penyusunan disertasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar doktor di Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, saya banyak mendapat tantangan dan pembelajaran, namun dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan tersebut dapat teratasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Promotor Prof. Dr. Bintan R. Saragih dan Prof. Dr. Valerine J.L. Khriekhoff, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yth. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, yang telah memberikan masukan untuk disertasi ini. Dr. Henry Soelistyobudi, S.H.,LL.M., selaku kepala Graduate Program UPH yang telah memberikan saya masukan dalam menulis disertasi ini.

Dengan ini saya berharap disertasi ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis dan juga dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.

10 Agustus 2020

Hormat saya,

Jessica Natalia Widjaja, B.A., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat	
Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat	
Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
1.6 Orisinalitas Disertasi.....	10

2.1.2.5 Nepotisme dan Korupsi.....	161
------------------------------------	-----

BAB 3 METODE PENELITIAN.....189

3.1	Metode Penelitian.....	189
-----	------------------------	-----

3.2	Jenis Data.....	191
-----	-----------------	-----

3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	191
-----	------------------------------	-----

BAB 4..... 4

ANALISIS.....194

4.1	Analisis Data.....	194
-----	--------------------	-----

4.1.1	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945...	194
-------	--	-----

4.1.2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	200
-------	--	-----

4.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	204
-------	---	-----

4.1.4	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.....	206
-------	--	-----

4.1.5	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang	
-------	--	--

	Pemilihan	Gubernur,	Bupati,	dan	
	Walikota.....				211
4.1.6	TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)				214
4.1.7.	TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)....				216
4.1.8	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).....				217
4.1.9	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....				220
4.1.10	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....				222
4.1.11	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.....				224
4.2	Tindakan Korupsi dalam Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan Dampaknya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....				232
4.2.1	Eksistensi Nepotis pada Pilkada Serentak Tahun 2017.....				239
4.2.2	Tindakan Korupsi oleh Mantan Gubernur Banten.....				249
4.2.3	Analisis Kasus Korupsi oleh Mantan Bupati Kutai Timur.....				264
4.2.4	Dampak Praktik Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..				272

4.2.5	Perbandingan Tindakan Nepotisme antara Indonesia dengan Filipina dan Thailand.....	274
4.3	Pengaturan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang Ideal ke Depan Untuk Mencegah Nepotisme.....	285
4.3.1	Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	285
4.3.2	Peran Partai Politik dalam Mengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.....	298
BAB		5
	PENUTUP.....	305
5.1	Kesimpulan.....	305
5.2	Rekomendasi.....	308
	DAFTAR PUSTAKA.....	315
	DAFTAR WAWANCARA.....	329

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kasus Korupsi Yang Berkaitan Dengan Dinasti Politik di Indonesia.....	237
Tabel 4.2 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2017 yang berasal dari Dinasti Politik.....	246
Tabel 4.3 Dinasti Politik Ratu Atut Chosiyah di Banten	250
Tabel 4.4 Tersangka Kasus Korupsi Bupati Kutai Timur.....	266

